

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.
- Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Freidman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Kadarudin. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Armico, Bandung, 1984.
- Maroni. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Saifuddin, Anwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta,

2010.

Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1977.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Spelt, N.M dan J.BJ. M. Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yoserwan. *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia..* Padang: Andalas University Press, 2019.

Zainal Andi, Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.

B. Artikel Jurnal

Ahmad dan Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif”, *Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies* 1, no. 1 (Desember 2021): 176.

Ansari, M Insa. “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.” *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 71–90.

Erland Junior Samad, “Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, *Lex Crimen*, Vol. 11, no. 6 (2022): 15.

Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman”, *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, no. 1 (Juni: 2022):8.

Jarborg, Nils. “Criminalization of the Last Resort.” *Ohio State Journal of Criminal Law* 2 (2004): 524.

Pramuji, Stevanus Eko dan Putri, Viorizza Suciani. “Meninjau Efektivitas Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Tata Ruang.” *Jurnal Pertanahan* Vol. 10 (2020): 91–107.

Putra, Yunandi Permana, Diani Kesuma, and Endra Wijaya. “Implementasi Dan Kendala Dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko.” *Jurnal Hukum Dan Bisnis* 9, no. 2 (2023): 179–92. <https://journal.univpencasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/6098>.

Rolando W Rorimpandey, “Dampak Yuridis Dalam Pranata Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. IV, no. 4 (Juni 2015): 79.

Ruben Achmad, “Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pidanaan dalam Sistem Hukum Pidana”, *Legalitas*, Vol. V, no. 2 (Desember 2013): 82.

Sheila Maulida Fitri, “Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Journal De Jure* 2, no. 1, (Desember 2020): 18

Suhariyono AR, “Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi*, Vol. 6, no. 4 (Desember 2009):620.

Subyakto, Kukuh. “Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015): 4–6. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1431>.

Yanles G Damanik. “Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 1, no. 4 (2020):61.

C. Tesis

Bahari, Alamsyah. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Keimigrasian.” Tesis Universitas Indonesia, 2019.

Dharmadji, Antonius Gunawan. “Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Bidang Perpajakan.” Tesis Universitas Airlangga, 2023.

Zulsya Fardan, Denny. “Kebijakan Hukum Pidana Tata Ruang Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Atas Pemanfaatan Ruang Di Indonesia.” Tesis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2016.

D. Internet

Komisi Yudisial RI, “CHA Mustamar: Kelemahan PTUN Terletak pada Eksekusi Putusan yang Sering Diabaikan” Komisi Yudisial RI. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15669/cha-mustamar-kelemahan-ptun-terletak-pada-eksekusi-putusan-yang-sering-diabaikan (diakses pada 20 Februari 2025)

Mahfuzulloh A. Murtadho, “Pembongkaran Tahap II Kawasan Puncak Diwarnai Amarah Warga, Pemkab Bogor Dinilai Diskriminatif” Tempo.co. <https://www.tempo.co/arsip/pembongkaran-tahap-ii-kawasan-puncak-diwarnai-amarah-warga-pemkab-bogor-dinilai-diskriminatif-15657> (diakses 20 Februari 2025).

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1411).

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 329/Pid.B/2023/PN Btm perihal Putusan Tingkat Pertama Budi Sudarmawan, 25 Mei 2023.

G. Lainnya

Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN, “Visi Penegakan Hukum Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dan Penanganan Sengketa Penataan Ruang Lingkup Materi Paparan,” November (2024).